

Strategi Gerakan Pariwisata *Mangrove* dalam Mewujudkan Perilaku Ekosentrisme

Aimie Sulaiman ¹, , Komang Jaka Ferdian ^{2,*}, , and
La Ode Muhamad Muliawan ², 

¹ Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung, 33172, Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia

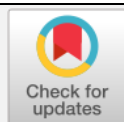
² Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung, 33172, Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia

* Korespondensi: komangjkf@ubb.ac.id

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:

Artikel Hasil Penelitian



Sitasi Cantuman:

Sulaiman, A., Ferdian, K. J., & Muliawan, L. O. M. (2021). *Mangrove Tourism Movement Strategy in Realizing Ecocentrism Behavior*. *Society*, 9(1), 380-392.

DOI: [10.33019/society.v9i1.243](https://doi.org/10.33019/society.v9i1.243)

Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society

OPEN  ACCESS



Artikel dengan akses terbuka.

Lisensi: Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)

Dikirim: 1 Oktober, 2020;

Diterima: 28 Juni, 2021;

Dipublikasi: 30 Juni, 2021;

ABSTRAK

Kerusakan ekologi pantai Bangka memaksa masyarakat untuk melakukan gerakan pelestarian lingkungan untuk memperbaiki ekologi lautnya. Gerakan lingkungan yang dilakukan oleh Kelompok HKm Gempa 01 di Desa Kurau Barat merupakan kegiatan ekosentrisme yang merupakan antitesis dari perilaku antroposentrisme yang telah merusak lingkungan di Kepulauan Bangka Belitung. Atas dasar itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mengetahui Strategi Gerakan Wisata Mangrove Berbasis Ekosentrisme. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dengan teknik purposive sampling, dan dokumen, sedangkan teknik analisis menggunakan triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Grup HKm Gempa 01 mengerahkan tiga pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, masyarakat, dan wisatawan, untuk mengelola kawasan Mangrove berdasarkan perilaku ekosentrisme. Keberhasilan pengelolaan kawasan membentuk strategi gerakan yang dapat menekan tiga pemangku kepentingan untuk mengubah perilaku antroposentrisme menuju perilaku ekosentrisme dalam pengelolaan kawasan Mangrove Munjang Kurau.

Kata Kunci: Ekosentrisme; Gerakan; Lingkungan; Strategi

1. Pendahuluan

Secara sederhana, pariwisata berarti seseorang atau kelompok untuk mendapatkan pengalaman yang menyenangkan tanpa ada paksaan dan bersifat sementara. Menurut Gunn & Turgut (2002), pariwisata memiliki tujuan sebagai berikut: 1) pariwisata harus memuaskan pengunjung; 2) pariwisata harus memiliki dampak ekonomi dan mengarah pada keberhasilan bisnis; 3) pariwisata harus menyediakan sumber daya yang berkelanjutan, dan 4) pariwisata harus menciptakan harmonisasi masyarakat dan wilayah. Berdasarkan tujuan tersebut, pariwisata harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan pengunjung serta menciptakan perlindungan lingkungan.

Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi wisata yang cukup besar. Potensi tersebut ditandai dengan masuknya empat *event* pariwisata dan budaya Kepulauan Bangka Belitung ke dalam *Calendar of Events* (CoE) Wonderful Indonesia 2020. Keempat *event* tersebut antara lain Musim Api Kota Toboali, Festival Tanjung Kelayang, Triathlon Sungailiat, dan Jelajah Pesona Jalur Rempah Belitung Timur. CoE Wonderful Indonesia 2020 memilih keempat *event* tersebut karena memenuhi tiga aspek utama: *Media Value*, *Cultural Creatives*, dan *CEO Commitment*, yang merupakan salah satu aspek terpenting dalam penyelenggaraan kegiatan pariwisata (Kompas.com, 2020).

CEO Commitment merupakan bentuk komitmen kepala daerah untuk mengembangkan pariwisata daerah. Bentuk komitmen yang perlu dilakukan kepala daerah adalah mengalokasikan anggaran di sektor pariwisata. Alokasi anggaran tersebut dapat tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Kompas.com, 2020).

Pemerintah Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen tinggi untuk melaksanakan *CEO Commitment*. Implementasi *CEO Commitment* ditandai dengan masuknya sektor pariwisata sebagai *leading sector* dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Selain itu, respon serius pemerintah adalah dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2025 (Megawandi, 2020; Valeriani, 2010).

Langkah yang dilakukan Pemerintah Daerah Kepulauan Bangka Belitung ini dinilai tepat dalam menempatkan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan dalam RPJMD dan RPJPD. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat banyak potensi sumber daya alam pesisir yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan wisata pantai. Potensi wisata pantai tersebar merata di Kepulauan Bangka Belitung, misalnya potensi lokasi *snorkeling* di Pantai Turun Aban Kabupaten Bangka; pemandangan alam pesisir di Pulau Panjang dan Pulau Tinggi, Kabupaten Bangka Selatan; wisata bahari, *resort*, pemancingan, dan taman rekreasi pantai di Kabupaten Belitung; dan wisata alam *mangrove* (Kantona et al., 2016; Andini et al., 2019; Husin et al., 2001).

Keberagaman potensi wisata dan optimisme pemerintah untuk meningkatkan potensi wisata menemui beberapa kendala dalam kegiatan kunjungan wisatawan dan kerusakan lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berikut data Badan Pusat Statistik Bangka Belitung Tahun 2012-2019 yang menggambarkan peningkatan dan penurunan jumlah wisatawan di Bangka Belitung, yaitu:



Gambar 1. Total Wisatawan di Kepulauan Bangka Belitung

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2020)

Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merilis data kenaikan dan penurunan wisatawan dari grafik di atas. Pada data di atas terlihat bahwa tingkat kunjungan wisatawan mengalami peningkatan dari tahun 2012 ke tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2016-2019 tingkat kunjungan wisatawan mengalami penurunan drastis sebesar -44%. Menurunnya tingkat kunjungan wisatawan tentunya dapat mengakibatkan gagalnya rencana pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2025 yang menargetkan peningkatan wisatawan dari luar Bangka Belitung sebesar 6%.

Selain jumlah kunjungan, komitmen pemerintah untuk mengembangkan pariwisata bertentangan dengan pemberian izin pertambangan timah yang merusak lingkungan. Pemerintah memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) seluas 1,1 juta hektar kepada pengelola yang meliputi wilayah darat dan laut. Pada akhirnya, aktivitas pertambangan berdampak pada kerusakan lingkungan yang masif dimana lumpur akibat pertambangan mengancam ekologi laut di Kepulauan Bangka Belitung dan mengancam aktivitas pariwisata (WALHI, 2019).

Ancaman kerusakan ekologi laut tentunya dapat menimbulkan bencana ekologis dan mengancam perekonomian masyarakat pesisir. Direktur Eksekutif WALHI Bangka Belitung menyatakan, lumpur yang dihasilkan dari kegiatan penambangan menyebabkan sedimentasi dan menutupi terumbu karang, sehingga mengakibatkan matinya habitat terumbu karang sebagai sumber makanan biota laut. Selain itu, dampak lumpur yang mencemari laut dapat terbawa ombak sejauh 30-40 km (MediaIndonesia.com, 2019). Kerusakan ekologi laut lainnya akibat kegiatan penambangan menyebabkan air laut di bibir pantai menjadi keruh. Berdasarkan hasil penelitian, air laut yang keruh di pantai Bangka Belitung mengandung logam berat seperti Timbal, Kadmium, dan Kromium. Hal ini menunjukkan bahwa air laut di pesisir Bangka Belitung telah dikategorikan tercemar (Kurniawan *et al.*, 2014; Wahyuni, 2013).

Kerusakan besar-besaran terhadap ekologi laut di Kepulauan Bangka Belitung merupakan dampak dari perilaku antroposentrisme. Menurut Keraf (2010), perilaku antroposentrisme dapat dijelaskan sebagai bentuk tindakan manusia sebagai pusat dari suatu sistem yang tidak memberikan nilai moral kepada lingkungan. Manusia bertindak merusak lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Perilaku antroposentrisme dari kegiatan pertambangan di Bangka Belitung telah mengakibatkan kerusakan ekologi laut. Hal ini ditandai dengan

munculnya teknologi kapal keruk dan kapal hisap sebagai alat penambangan timah dengan sifat merusak dasar laut. Kerusakan ekologi laut Bangka memaksa masyarakat untuk memperbaiki ekologi lautnya dengan membentuk gerakan lingkungan. Gerakan ini dilakukan dengan merevitalisasi kawasan *mangrove* di Desa Kurau Barat. Kegiatan ekosentrisme sebagai respon lingkungan di Desa Kurau Barat ini merupakan antitesis dari perilaku antroposentrisme yang jamak ditemukan dalam pengelolaan sumber daya alam. Dampaknya telah merusak lingkungan di Kepulauan Bangka Belitung.

Menurut Keraf (2010), perilaku ekosentrisme merupakan antitesis dari munculnya perilaku antroposentrisme. Dengan kata lain, ekosentrisme merupakan bentuk kesadaran manusia akan kerusakan lingkungan yang memicu manusia untuk memberikan nilai moral pada makhluk hidup dan tak hidup. Oleh karena itu, manusia berdasarkan ekosentrisme harus hidup berdampingan dengan lingkungannya untuk membentuk pola interaksi yang saling membutuhkan.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, kajian tentang Strategi Gerakan Wisata *Mangrove* Munjang Kurau dalam Mewujudkan Perilaku Ekosentrisme menarik untuk dikaji. Untuk itu penelitian ini akan mencoba mendeskripsikan bagaimana Strategi Gerakan Wisata *Mangrove* Munjang Kurau dalam Mewujudkan Perilaku Ekosentrisme.

2. Kajian Pustaka

Gerakan sosial dilakukan dalam bentuk kolektif yang berisikan orang-orang yang pada hakikatnya memiliki tujuan atau cita-cita bersama yang diwujudkan dalam solidaritas. Kata kunci penting dalam menjelaskan suatu gerakan sosial, menurut Tarrow (1998), adalah adanya tantangan kolektif, tujuan bersama, solidaritas sosial, dan interaksi yang berkesinambungan. Menurut Wilson (1973), gerakan sosial menekankan cara-cara yang tidak terlembagakan, dan tujuannya bukan untuk mendapatkan posisi kekuasaan. Menurut Della-Porta & Diani (1999), empat karakteristik gerakan sosial adalah jaringan interaksi informal, perasaan dan solidaritas bersama, konflik sebagai fokus kolektif, dan mempromosikan bentuk protes.

Pariwisata berkelanjutan menjelaskan bahwa pariwisata harus memenuhi dua syarat utama, yaitu mampu memenuhi kebutuhan saat ini dan masa depan serta tidak merusak alam dan budaya masyarakat setempat sehingga dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Oleh karena itu, pariwisata berkelanjutan harus menjunjung tinggi sikap atau perilaku ketika mengunjungi tempat wisata yaitu bertanggung jawab agar tidak menimbulkan kerusakan alam dan budaya daerah yang dikunjungi serta perlunya sikap menghargai adat budaya penduduk daerah tempat wisata (Nurhidayati, 2015).

Gerakan sosial dan pariwisata saat ini sedang berkompromi untuk menghasilkan berbagai produk kesejahteraan kolektif untuk menggeser paradigma industri pariwisata. Keberlanjutan gerakan sosial pariwisata berkelanjutan dalam mencapai tujuannya menargetkan tiga fokus utama: Pemerintah, Masyarakat, dan Wisatawan. Penguatan ketiga hal tersebut perlu dilakukan untuk menjaga komitmen bersama terhadap kegiatan pariwisata berkelanjutan. Gerakan pariwisata membutuhkan legitimasi dari pemerintah sebagai bentuk komitmen bersama dalam menentukan kebijakan publik. Pemerintah perlu mengutamakan perlindungan, pengawasan, dan pengendalian dalam pelaksanaan pariwisata berkelanjutan (Arfan *et al.*, 2017). Pemerintah juga perlu setidaknya membantu gerakan pariwisata dalam mengembangkan potensi pariwisata. Tanpa peran pemerintah, gerakan sosial hanya akan fokus pada satu potensi di kawasan wisata yang menyimpan berbagai potensi, seperti pengembangan kawasan pesisir di Kabupaten Tangerang yang hanya fokus pada potensi pantai (Fadli & Nurlukman, 2018).

Gerakan pariwisata berkelanjutan tidak hanya membutuhkan dukungan pemerintah tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan pariwisata. Pariwisata berbasis gerakan setidaknya perlu membentuk kelompok masyarakat untuk melakukan aktivitasnya. Sebut saja wisata *mangrove* yang membutuhkan perawatan, pembibitan, dan penanaman untuk menjaga lingkungan (Martuti *et al.*, 2018). Pelestarian wilayah pesisir yang dilakukan secara kolektif akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan biota laut, bahan kerajinan, mengurangi bencana seperti abrasi dan lain-lain.

Gerakan pariwisata berkelanjutan juga harus memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi para wisatawannya. Pengalaman berkesan yang perlu ditonjolkan bagi pengunjung adalah mencintai alam dan budaya saat berkunjung. Pengembangan wisata *mangrove* Wonorejo di Surabaya menekankan nilai-nilai konservasi, rehabilitasi, dan pemberdayaan kepada pengunjungnya (Wahyuni *et al.*, 2015). Selama di Kabupaten Buleleng, wisatawan diberikan pengalaman *snorkeling* dan edukasi tentang menjaga terumbu karang (Citra, 2017).

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode atau jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dijelaskan oleh Creswell, yaitu penelitian yang menggali dan memahami makna individu atau kelompok dalam masalah kehidupan sosial (Creswell, 2009). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi ke lokasi penelitian; Wawancara dengan teknik *purposive sampling* dengan mewawancarai Ketua dan anggota Kelompok HKm Gempa 01, Pemerintah Desa, dan wisatawan; mendokumentasikan data lapangan seperti profil kawasan wisata *Mangrove* Munjang Kurau, peraturan terkait, dan media massa. Teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi data yang menggabungkan data lapangan dengan teori untuk memunculkan analisis guna menjawab rumusan masalah.

4. Hasil Penelitian

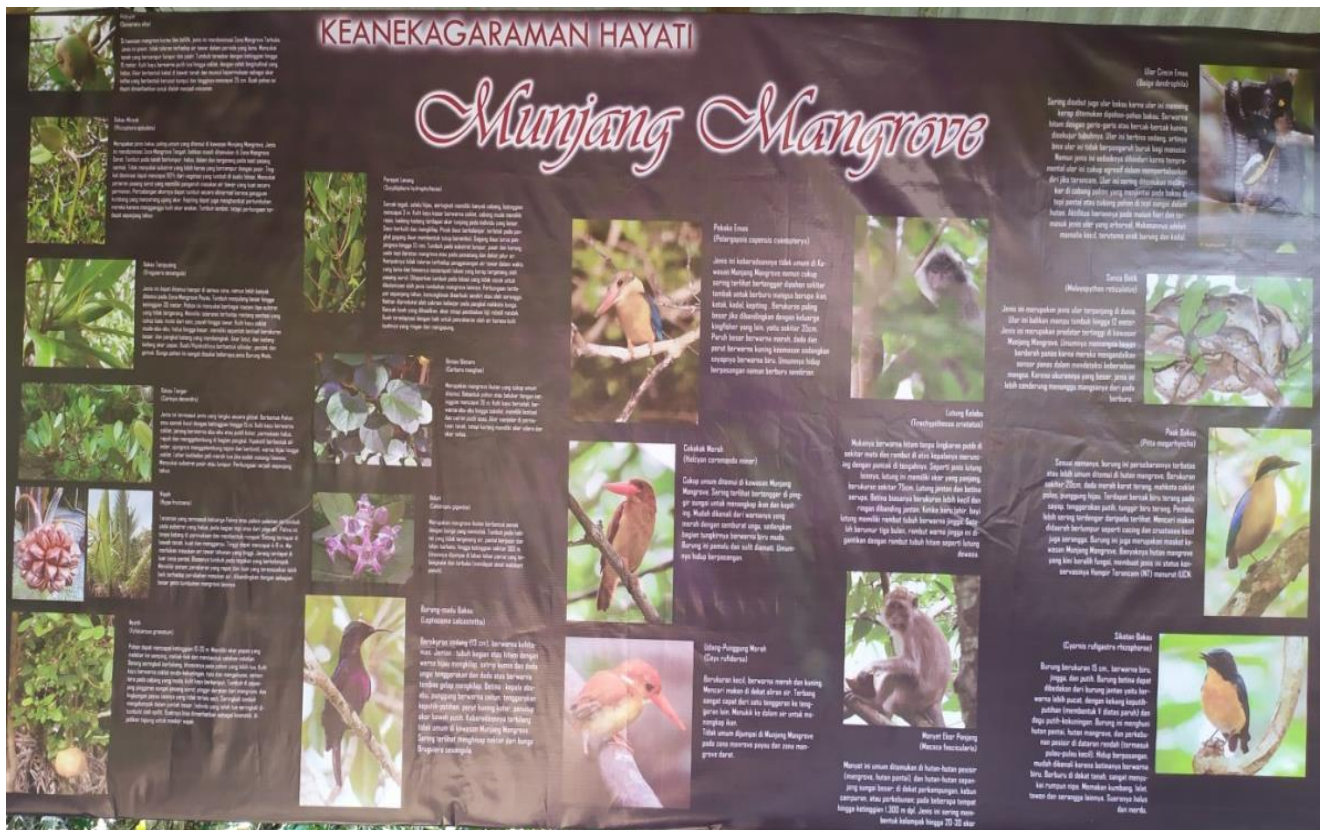
Kelompok HKm Gempa (Gerakan Muda Pecinta Alam) 01 adalah sebuah gerakan lingkungan yang bereaksi berdasarkan kerusakan lingkungan di Bangka Belitung akibat kegiatan pertambangan. Kelompok HKm Gempa 01 yang digagas dan diketuai oleh Yasir mencoba menyelamatkan lingkungan dengan mengembangkan kawasan *mangrove* di Kabupaten Bangka Tengah, di Desa Kurau Barat. Gerakan pelestarian lingkungan ini dinilai berhasil sejak lahir pada tahun 2005.

Sejak tahun 2005, upaya konservasi kawasan *mangrove* yang dikenal sebagai *Mangrove* Munjang telah digalakkan oleh kelompok HKm Gempa 01. Meski awalnya, gerakan rehabilitasi kawasan hutan masih dipandang sebagai aksi kerelawanan untuk pelestarian lingkungan di tengah maraknya perusakan ekosistem di kawasan Munjang Kurau. Gerakan ini kemudian memperluas perlakuannya terhadap kawasan *mangrove* Kurau dengan melihatnya sebagai satu kesatuan yang harus dilestarikan dan perlu dikembangkan dan dimanfaatkan.

Masa dari kesukarelaan untuk mencegah kerusakan lingkungan hingga dikeluarkannya berbagai kebijakan terkait pemanfaatan kawasan ini menggambarkan pergeseran cara pandang Kelompok HKm Gempa 01 dalam memandang kawasan *mangrove* Kurau. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi pintu masuk bagi gerakan ini untuk memanfaatkan kawasan *Mangrove* Kurau untuk motif pelestarian lingkungan dan memperoleh manfaat ekonomi. Namun, meluasnya perlakuan terhadap kawasan *mangrove* Kurau sebagai objek yang dapat dikelola untuk memperoleh manfaat ekonomi tidak serta merta menghilangkan gagasan pelestarian lingkungan di kawasan ini. Aksi pelestarian lingkungan terus digalakkan sehingga

pada akhirnya gerakan ini dapat dikatakan berhasil dalam mengembangkan pelestarian kawasan pesisir.

Menurut Wijaya (2019), keberhasilan yang dicapai dalam gerakan ini dapat menjaga keanekaragaman hayati, memunculkan berbagai jenis mangrove yang tidak dimiliki daerah lain, serta dapat menahan abrasi dan gelombang besar. Keanekaragaman hayati dan berbagai jenis mangrove di kawasan Munjang Kurau dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. Keanekaragaman Hayati Mangrove Munjang Kurau

Gambar di atas merupakan bukti bahwa kawasan mangrove Munjang Kurau tetap terjaga dan dapat menjadi ekosistem baru bagi makhluk hidup lainnya. Kelestarian kawasan Mangrove tidak lepas dari konsistensi Kelompok HKM Gempa 01 dalam hal pengelolaan. Keberhasilan pengelolaan kawasan Mangrove akhirnya memberi ruang bagi Grup HKM Gempa 01 untuk mengembangkan wisata mangrove ramah lingkungan yang diresmikan pada tahun 2017.

Kegiatan pengembangan pariwisata terus dilakukan dengan berbagai kegiatan seperti penangkaran berbagai jenis mangrove, serta konservasi (Saputra et al., 2019) menunjukkan adanya pergeseran cara pandang terhadap Mangrove Kurau dari objek yang harus dilestarikan menjadi objek yang dapat mendatangkan manfaat ekonomi dan tidak mengurangi upaya pelestarian lingkungan yang merupakan ide awal dari gerakan pengelolaan kawasan. Kelompok HKM Gempa 01 masih melakukan upaya konservasi. Hal ini terlihat dari terbentuknya kerjasama dengan pemerintah daerah dan Kementerian terkait yang semakin intens, terutama setelah dikeluarkannya kebijakan mengenai pemanfaatan kawasan Kurau untuk dikelola oleh Kelompok HKM Gempa 01. Upaya pelestarian, dalam hal ini Kelompok HKM Gempa 01 berusaha meminimalkan akses publik ke kawasan tersebut untuk mencegah

perambahan. Pelestarian juga berfokus pada pemberian pendidikan lingkungan kepada wisatawan.

Ketiga upaya tersebut di atas setidaknya berdampak pada keberhasilan pengelolaan kawasan *mangrove* sebagai pariwisata yang berwawasan lingkungan. Keberhasilan pengelolaan kawasan *mangrove* oleh Kelompok HKM Gempa 01 ditunjukkan dengan kemampuannya mengarahkan tiga pemangku kepentingan: pemerintah sebagai pembuat kebijakan, masyarakat sebagai penerima manfaat, dan wisatawan sebagai objek dalam memberikan pendidikan lingkungan. Berikut ini adalah peran dan fungsi pemangku kepentingan yang diarahkan oleh Kelompok HKM Gempa 01 untuk mencapai paradigma ekosentrisme dalam pengembangan wisata *Mangrove*, yaitu:

4.1. Kelompok HKM Gempa 01 Menekan Pemerintah dalam Pengembangan *Mangrove*

Gerakan yang dilakukan Kelompok HKM Gempa 01 sejak tahun 2004 secara konsisten membutuhkan landasan hukum untuk mengelola kawasan *mangrove* menjadi destinasi pariwisata. Menurut Ketua Kelompok HKM Gempa 01, hal ini dianggap penting agar agenda-setting kelompok memiliki dasar hukum yang tetap. Atas dasar itu, gerakan ini mencoba mendorong pemerintah untuk menetapkan kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi di Kabupaten Bangka Tengah (wawancara dengan ketua Kelompok HKM Gempa 01 pada 21 Agustus 2020).

Pada tanggal 2 September 2015, perjuangan kelompok tersebut membuahkan hasil. Pemerintah akhirnya memberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKM) di Kabupaten Bangka Tengah. Izin tersebut tertuang dalam Keputusan Nomor 358/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan seluas 1.057 Ha pada Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Produksi Tetap di Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Menurut Ketua Kelompok HKM Gempa 01, keputusan tersebut memberi ruang bagi mereka untuk mendorong pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan pengelolaan kawasan hutan (wawancara dengan ketua Kelompok HKM Gempa 01 pada 21 Agustus 2020). Tepat pada tanggal 29 Februari 2016, Pemerintah Daerah melalui Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 188.44/209/DISHUT/2016 menetapkan bahwa pengelolaan konservasi seluas 213 Ha dikuasai oleh Kelompok HKM Gempa 01 untuk 35 tahun. Berdasarkan dua keputusan tersebut, Grup HKM Gempa 01 telah memperoleh hak penuh untuk mengelola *Mangrove* Munjang Kurau.

Hak penuh atas pengelolaan kawasan hutan kemudian memberikan kesempatan kepada kelompok untuk membentuk kawasan wisata berbasis lingkungan. Strateginya penetapan kawasan wisata dilegitimasi, sehingga gerakan ini mendorong Gubernur Bangka Belitung untuk meresmikan kawasan tersebut sebagai destinasi pariwisata. Pada 27 Juli 2017, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung akhirnya meresmikan kawasan *Mangrove* Kurau Barat sebagai Ekowisata *Mangrove* Munjang Kurau (wawancara dengan anggota Kelompok HKM Gempa 01 pada 21 Agustus 2020).

Perjuangan membentuk Ekowisata *Mangrove* Munjang Kurau belum berhenti. Kelompok HKM Gempa 01 membutuhkan dana dari pemerintah dalam menjalankan program pengembangan. Agar pemerintah tidak mengubah perencanaan awal kelompok, kelompok membentuk *Masterplan* selama 3 tahun dan mengajukan MoU kepada pemerintah. Rencana induk tentunya harus berdasarkan keputusan kelompok dan tidak merusak infrastruktur yang telah ditetapkan. Hal inilah yang menjadi dasar kelompok tersebut menolak dana pemerintah yang tidak sesuai dengan rencana pengembangan *mangrove*.

Tindakan pemerintah memberikan izin dan pendanaan untuk mengembangkan kawasan ekowisata kepada Kelompok HKm Gempa 01 di atas merupakan bentuk kekuasaan yang dijelaskan oleh [Andrain \(1992\)](#) bahwa kekuasaan dapat dicapai melalui basis pengetahuan. Kelompok tersebut dalam hal ini memiliki basis kekuatan pengetahuan pengembangan dan legalitas dalam hal pengelolaan kawasan *mangrove*. Berdasarkan dua basis kekuatan ini, kelompok dapat mempengaruhi pemerintah untuk melindungi lingkungan dan mengembangkan pariwisata.

4.2. Kelompok HKm Gempa 01 Membatasi Akses Masyarakat dan Berkolaborasi dengan Pemuda Desa Kurau Barat Melakukan Pelestarian Lingkungan

Upaya pelestarian *mangrove* di Desa Kurau Barat, menurut Ketua Kelompok HKm Gempa 01 telah dilakukan sejak tahun 2005. Konservasi dilakukan dengan memanfaatkan hutan *mangrove* di sekitar Desa Kurau Barat. Pada tahun 2005, menurut perangkat Desa Kurau Barat, kawasan *Mangrove* di Desa Kurau Barat dapat dikatakan sudah mulai rusak karena terabaikan oleh pemerintah dan masyarakat.

Awalnya, konservasi dilakukan oleh masyarakat setempat yang berkomitmen untuk merawat kawasan *mangrove*. Strategi konservasi memanfaatkan kearifan lokal, membentuk kelompok masyarakat kurang lebih 10 orang serta menanam dan merawat *mangrove*. Ketua Kelompok HKm Gempa 01 memilih anggota melalui sistem kekerabatan dan pemuda masyarakat di sekitar desa Kurau Barat (wawancara dengan anggota Kelompok HKm Gempa 01 pada 21 Agustus 2020).

Langkah selanjutnya setelah penanaman *mangrove*, kelompok mulai membatasi akses masyarakat untuk masuk ke kawasan *Mangrove* (wawancara dengan pemerintah desa Kurau Barat pada 4 September 2020). Pembatasan tersebut bukan tanpa alasan; Menurut Ketua Kelompok HKm Gempa 01, perilaku masyarakat menebang pohon di kawasan *mangrove* dinilai merusak. Atas dasar itu, penting untuk membatasi akses agar lingkungan *mangrove* tetap lestari (wawancara dengan Ketua Kelompok HKm Gempa 01 pada 21 Agustus 2020).

Strategi konservasi yang dilakukan dinilai berhasil karena kawasan *Mangrove* Munjang Kurau memiliki sedikitnya 40 jenis *mangrove*. Konservasi dilakukan secara bertahap hingga menjadi kawasan konservasi udang, kepiting, ikan, burung, kera, dan satwa lainnya. Saat ini, pada tahun 2020 setidaknya kawasan *Mangrove* Munjang Kurau tetap terjaga. Ekosistemnya menjadi acuan untuk pengembangan kawasan *mangrove* lainnya di Bangka Belitung (wawancara dengan pemerintah desa Kurau Barat pada 4 September 2020).

Selain menjadi rujukan daerah lain, saat ini Munjang Kurau menjadi pemasok bibit *mangrove* untuk daerah sekitarnya. Berikut data produksi dan distribusi *Mangrove* Munjang Kurau:

Tabel 1. Produksi dan Distribusi *Mangrove* di Kawasan Munjang Kurau

No	Deskripsi	<i>Rhizophora Apiculata</i>	<i>Rhizophora Mucronata</i>	<i>Rhizophora Stylosa</i>	Jumlah
1	Februari				
	Produksi	1.700	1.000	1.000	3.700
	Distribusi	-	-	-	-
2	Maret				
	Produksi	11.300	10.000	10.000	31.300
	Distribusi	-	-	-	-

No	Deskripsi	<i>Rhizophora Apiculata</i>	<i>Rhizophora Mucronata</i>	<i>Rhizophora Stylosa</i>	Jumlah
3	April				
	Produksi	5.250	3.000	3.000	11.250
	Distribusi	4.000	2.800	1.000	7.800
4	Mei				
	Produksi	-	-	-	-
	Distribusi	500	10.000	-	10.500
5	Juni				
	Produksi	8.750	2.500	2.500	13.750
	Distribusi	6.200	5.000	10.000	21.200
6	Juli				
	Produksi	5.000	10.000	5.000	20.000
	Distribusi	5.000	-	-	5.000

Sumber: Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Baturusa, Cerucuk (2020)

4.3. Kelompok HKm Gempa 01 Memberikan Nilai Edukasi dan Jasa Lingkungan *Mangrove* kepada Wisatawan

Kelompok HKm Gempa 01 secara sadar mengambil tindakan untuk mengedukasi dan memberikan jasa lingkungan kepada wisatawan. Aksi sadar ini ditandai dengan adanya jembatan dan fasilitas perahu bagi wisatawan untuk berkeliling kawasan *mangrove*. Berikut ini adalah gambar edukasi dan jasa lingkungan bagi wisatawan di Kawasan *Mangrove* Munjang Kurau.



Gambar 3. Fasilitas Pendidikan di Mangrove Munjang Kurau

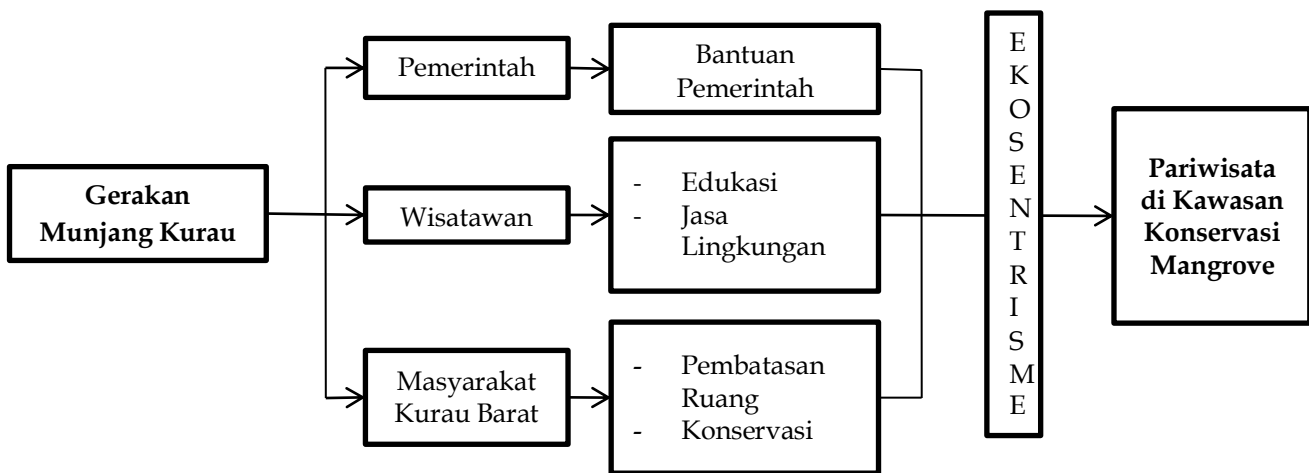
Edukasi yang diberikan terkait dengan habitat *mangrove* hingga jenis satwa yang dikembangkan. Pengunjung juga bisa langsung berinteraksi dan melihat langsung ekosistem di kawasan *mangrove* (wawancara dengan wisatawan pada 21 Agustus 2020). Sementara dari sisi jasa lingkungan, Kelompok HKm Gempa 01 juga memproduksi *mangrove* dan dipercaya pemerintah untuk mendistribusikan bibit *mangrove* kepada masyarakat yang ingin menanam.

Pengalaman wisata yang ditanamkan pada pengunjung tentunya berpengaruh terhadap penyelamatan lingkungan di Bangka Belitung. Sebagai contoh, saat ini keberhasilan pengelolaan kawasan Ekowisata *Mangrove* Munjang Kurau telah mempengaruhi beberapa masyarakat pesisir di Bangka Selatan, Bangka Barat, dan Bangka untuk mengelola *Mangrove* (wawancara dengan wisatawan pada 21 Agustus 2020).

Efek ini dapat dijelaskan sebagai bentuk teori kekuasaan yang dijelaskan oleh Dahl (1978) bahwa seseorang dapat dipengaruhi dalam kesadaran sukarela. Kelompok HKm Gempa 01 secara tidak langsung mempengaruhi masyarakat melalui pendidikan dan jasa lingkungan. Kegiatan tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi masyarakat Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Bangka, yang secara tidak sadar bergerak untuk menyelamatkan lingkungan.

5. Pembahasan

Hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya menggambarkan bahwa Kelompok HKm Gempa 01 memiliki strategi atau skema dalam mengelola pengembangan wisata *Mangrove* Munjang sesuai dengan perilaku ekosentrisme. Skema strategis yang dikembangkan Kelompok HKm Gempa 01 mencakup tiga pemangku kepentingan penting: pemerintah sebagai pembuat kebijakan, masyarakat sebagai pelaksana tata kelola, dan wisatawan sebagai objek pendidikan pelestarian lingkungan. Berikut skema strategis yang dilakukan Kelompok HKm Gempa 01 untuk mengelola wisata *mangrove* berbasis ekosentrisme:



Gambar 4. Strategi Gerakan Wisata Munjang Kurau Berbasis Ekosentrisme

Sumber: Data diolah (2020)

Kelompok HKm Gempa 01 melakukan strategi di atas untuk menekan pemangku kepentingan agar mengikuti pola pikir pengelolaan pariwisata berbasis ekosentrisme. Penelitian ini akan menggunakan konsep kekuasaan Dahl (1978), yang menyatakan bahwa kekuasaan adalah keterampilan individu atau kelompok yang dapat menggerakkan atau mempengaruhi perilaku objek sehingga objek dapat mengikuti subjek. Selain itu, Lasswell

(1948) juga menjelaskan bahwa kekuasaan adalah tindakan siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana (*who get what, when, and how*).

Teori kekuasaan dapat menggambarkan tindakan yang dilakukan oleh Kelompok HKm Gempa 01 dari tahun 2005 hingga sekarang 2020, yang dapat mempengaruhi ketiga pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan dan sekaligus melestarikan lingkungan pesisir di Kabupaten Bangka Tengah. Kelompok HKm Gempa 01 memiliki *Bargaining Power* berupa pengetahuan dalam pengembangan *Mangrove*. Hal ini memberikan nilai kekuatan bagi Kelompok HKm Gempa 01 untuk mempengaruhi ketiga pemangku kepentingan dalam mewujudkan pelestarian lingkungan berdasarkan perilaku ekosentrisme.

Selain teori kekuasaan, penelitian ini juga menggunakan teori Gerakan Sosial yang ditawarkan oleh Sidney Tarrow. Menurut Tarrow (1998), gerakan sosial adalah adanya tantangan kolektif, pemahaman akan tujuan bersama, solidaritas sosial, dan interaksi yang berkesinambungan. Teori ini dapat menjelaskan bagaimana Kelompok HKm Gempa 01 mempengaruhi pemerintah, wisatawan, dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan *Mangrove* Munjang Kurau dalam mewujudkan perilaku ekosentrisme.

Kelompok HKm Gempa 01 memahami tujuan bersama dengan menekan ketiga pemangku kepentingan untuk ikut serta dalam alur pemikiran pelestarian lingkungan berbasis perilaku ekosentrisme yang merupakan ide awal dari gerakan pengelolaan kawasan. Ketiga pemangku kepentingan tidak diberi ruang untuk mengelola kawasan *mangrove* Munjang Kurau tanpa persetujuan kelompok. Inilah yang memperkuat kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Ketika semua pemangku kepentingan telah memahami tujuan bersama dari pelestarian lingkungan, solidaritas sosial terbentuk untuk menggerakkan tujuan bersama dan mengubah perilaku antroposentrisme menjadi ekosentrisme dalam mengelola Kawasan Mangrove Munjang Kurau.

6. Kesimpulan

Stigma Provinsi Bangka Belitung sebagai daerah yang mengalami degradasi lingkungan saat ini berubah dengan munculnya pengelolaan wisata *Mangrove* Munjang Kurau. Pengelolaan wisata *Mangrove* Munjang Kurau dimotori oleh Kelompok HKm Gempa 01. Kelompok HKm Gempa 01 memiliki ide awal dari gerakan tersebut, yaitu menyelamatkan lingkungan pesisir di Desa Kurau Barat, Kabupaten Bangka Tengah. Awalnya dilakukan secara mandiri, gerakan penyelamatan lingkungan dapat menjadi model bagi daerah lain untuk mengembangkan kawasan *Mangrove*. Gerakan penyelamatan lingkungan yang dilakukan oleh Kelompok HKm Gempa 01 setidaknya merupakan implementasi dari perilaku ekosentrisme.

Keberhasilan pengelolaan kawasan *Mangrove* Munjang Kurau berbasis perilaku ekosentrisme yang dilakukan tidak lepas dari strategi yang dikembangkan oleh Kelompok HKm Gempa 01. Strategi pengelolaan kawasan yang dilakukan oleh Kelompok HKm Gempa 01 melibatkan tiga pemangku kepentingan, yaitu Pemerintah, Masyarakat dan Wisatawan. Gerakan dengan pendekatan tekanan dan pengarah ketiga pemangku kepentingan tersebut mengubah antroposentrisme menjadi perilaku ekosentrisme dalam mengelola kawasan *Mangrove* Munjang Kurau. dalam pengelolaan kawasan *mangrove* Munjang Kurau. Setelah memahami tujuan, tahap selanjutnya adalah penyalarsan perilaku dalam pengelolaan kawasan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Singkat cerita, kelompok ini berhasil memainkan peran kunci dalam mengelola kawasan Munjang Kurau.

7. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan dana melalui Surat Keputusan nomor 162/UN50/11/PP/2020 tentang Penerima Hibah Penelitian Dosen Tingkat Fakultas Universitas Bangka Belitung.

8. Pernyataan *Conflicts of Interest*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

Daftar Pustaka

- Andini, D. E., Guskarnali, G., & Irvani, I. (2019). Analisis Potensi dan Strategi Pengembangan Wisata Bahari di Pulau Panjang dan Pulau Tinggi Kabupaten Bangka Selatan. *IKRA-ITH ABDIMAS*, 2(3), 101-107. Retrieved from <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-ABDIMAS/article/view/593>
- Andrain, C. F. (1992). *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta, Indonesia: Tiara Wacana.
- Arfan, A., Umar, R., & Fauzi, K. (2017). Peranan Pemerintah, Masyarakat dan Strategi Pengelolaan Ekowisata Hutan Mangrove di Tongke Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. *Sainsmat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pengetahuan Alam*, 6(2), 107-115. Retrieved from <https://ojs.unm.ac.id/sainsmat/article/view/6460>
- Citra, I. P. A. (2017). Strategi Pemberdayaan Masyarakat untuk Pengembangan Ekowisata Wilayah Pesisir di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6(1), 31. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v6i1.8484>
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: SAGE Publications.
- Della-Porta, D., & Diani, M. (1999). *Social Movements: An Introduction*. Oxford: Blackwell.
- Saputra, D., Salim, K., & Christianingrum, C. (2019). Strategi Pengelolaan Ekowisata Mangrove Munjang di Desa Kurau Barat Kabupaten Bangka Tengah. *Akuatik: Jurnal Sumberdaya Perairan*, 13(1), 27-41. <https://doi.org/10.33019/akuatik.v13i1.1078>
- Dahl, R. A. (1978). *Modern Political Analysis*. New Delhi: Prentice-Hall of India.
- Fadli, Y., & Nurlukman, A. D. (2018). Kolaborasi Pemerintah dalam Pengembangan Terpadu Wilayah Pesisir di Kabupaten Tangerang melalui Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai (Gerbang Mapan). Prosiding Seminar Nasional Unimus. 1, pp. 517-529. Semarang: Universitas Muhammadiyah Semarang. Retrieved from <https://prosiding.unimus.ac.id/index.php/semnas/article/view/94>
- Gunn, C. A., & Turgut, V. (2002). *Tourism Planning: Basic Concept Cases*. New York: Routledge.
- Husin, H., Silalahi, S. B., Kartono, H., & Indra, T. L. (2001). Wilayah Potensial Wisata Bahari di Kabupaten Belitung. Retrieved from <http://staff.ui.ac.id/system/files/users/tito.latif/publication/belitung.pdf>
- Kantona, I., Adi, W., & Kurniawan, K. (2016). Potensi Kesesuaian Lokasi Wisata Selam Permukaan Snorkling sebagai Pengembangan Wisata Bahari Pantai Turun Aban Kabupaten Bangka. *Akuatik: Jurnal Sumberdaya Perairan*, 10(2), 22-29. Retrieved from <https://journal.ubb.ac.id/index.php/akuatik/article/view/339>
- Keraf, A. S. (2010). *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta, Indonesia: PT Kompas Media Nusantara.
- Kompas.com. (2020, March 1). Penuhi Kriteria, Empat Event Babel Lolos CoE Wonderful Indonesia 2020 Halaman all - Kompas.com. *KOMPAS.Com*. Retrieved from

<https://regional.kompas.com/read/2020/03/01/18040381/penuhi-kriteria-empat-event-babel-lolos-coe-wonderful-indonesia-2020?page=all>

- Kurniawan, K., Supriharyono, S., & Sasongko, D. P. (2014). Pengaruh Kegiatan Penambangan Timah terhadap Kualitas Air Laut di Wilayah Pesisir Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Akuatik: Jurnal Sumber Daya Perairan*, 8(1), 13-21. Retrieved from <https://journal.ubb.ac.id/index.php/akuatik/article/view/967>
- Lasswell, H. D. (1948). The structure and function of communication in society. In L. Bryson (Ed.), *The communication of ideas* (pp. 37-51). New York: Harper and Row.
- MediaIndonesia.com. (2019, December 29). Konflik Tambang Laut di Babel Rugikan Nelayan Kecil. Retrieved from <https://mediaindonesia.com/nusantara/280344/konflik-tambang-laut-di-babel-rugikan-nelayan-kecil>
- Martuti, N. K. T., Susilowati, S. M. E., Sidiq, W. A. B. N., & Mutiatari, D. P. (2018). Peran Kelompok Masyarakat dalam Rehabilitasi Ekosistem Mangrove di Pesisir Kota Semarang. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 6(2), 100. <https://doi.org/10.14710/jwl.6.2.100-114>
- Megawandi, Y. (2020). Pengembangan Pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Pendekatan Whole of Government. *Jurnal Widyaiswara Indonesia*, 1(2), 108-119. Retrieved from <http://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/27>
- Nurhidayati, S. E. (2015). Studi evaluasi penerapan Community Based Tourism (CBT) sebagai pendukung agrowisata berkelanjutan. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 28(1), 1. <https://doi.org/10.20473/mkp.v28i12015.1-11>
- Tarrow, S. (1998). *Social Movements and Contentious Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Valeriani, D. (2010). Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Equity: Jurnal Ekonomi*, 1(4), 1-27.
- Wahyuni, H. (2013). Kandungan Logam Berat pada Air, Sedimen dan Plankton di Daerah Penambangan Masyarakat Desa Batu Belubang Kabupaten Bangka Tengah. Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (pp. 489-494). Semarang: Universitas Diponegoro. Retrieved from <http://eprints.undip.ac.id/40714/>
- Wahyuni, S., Sulardiono, B., & Hendrarto, B. (2015). Strategi Pengembangan Ekowisata Mangrove Wonorejo, Kecamatan Rungkut Surabaya. *Management of Aquatic Resources Journal (MAQUARES)*, 4(4), 66-70. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/maquares/article/view/9775>
- WALHI. (2019, September 6). Hari Bumi, Babel Darurat Bencana Ekologi. Retrieved from <https://www.walhi.or.id/hari-bumi-babel-darurat-bencana-ekologi>
- Wijaya, T. (2019, June 16). Timah yang Membuat Wajah Bangka Tidak Bahagia. Retrieved from <https://www.mongabay.co.id/2019/06/16/timah-yang-membuat-wajah-bangka-tidak-bahagia/>
- Wilson, J. (1973). *Introduction Social Movements*. New York: Basic Books.

Tentang Penulis

1. **Aimie Sulaiman** memperoleh gelar Doktor dari Universitas Padjadjaran, Indonesia, pada tahun 2021. Penulis adalah dosen pada Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung.
E-Mail: aimie@ubb.ac.id
2. **Komang Jaka Ferdian** memperoleh gelar Magister Ilmu Politik dari Universitas Diponegoro, Indonesia, pada tahun 2017. Penulis adalah dosen pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung.
Email: komangjfk@ubb.ac.id
3. **La Ode Muhamad Muliawan** memperoleh gelar Magister Politik dan Pemerintahan dari Universitas Gadjah Mada, Indonesia, pada tahun 2018. Penulis adalah dosen pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung.
Email: odeubb@gmail.com